

DRAF SEMENTARA UNTUK
KEPERLUAN WORKSHOP
TIDAK UNTUK DIKUTIP



**MODUL BAHAN AJAR WORKSHOP GURU SEJARAH
MATA PELAJARAN SEJARAH
Tingkat Sekolah Menengah Atas Kelas XII**

DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI BUDAYA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2015

Rudy Gunawan NTB.02/08/2015.

DRAF SEMENTARA UNTUK
KEPERLUAN WORKSHOP
TIDAK UNTUK DIKUTIP



**MODUL BAHAN AJAR WORKSHOP GURU SEJARAH
MATA PELAJARAN SEJARAH
Tingkat Sekolah Menengah Atas Kelas XII**

PENGARAH:
Direktur Jenderal Kebudayaan
Direktur Sejarah dan Nilai Budaya

TIM PENYUSUN:
Linda Sunarti, G Ambar Wulan, Suharto,
Saleh As'ad Djamhari,
Rudy Gunawan, Abdurrahman, Asep Suryana

EDITOR:
Kasijanto

DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI BUDAYA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2015

DAFTAR ISI

1	
DUNIA PADA MASA PERANG DINGIN	
KEBANGKITAN ASIA AFRIKA DAN PERUBAHAN POLITIK GLOBAL 1	
I.1 Asal Mula Perang Dingin 4	
I.2 Kebangkitan Asia Afrika 14	
I.3 Gerakan Non Blok 30	
II. Kerja Sama Ekonomi Regional dan Internasional 36	
II.1. ASEAN 36	
II.2. AFTA/Asean Free Trade Area 42	
II.3. Uni Eropa (UE) 45	
II.4 GATT dan WTO 48	
II.5. APEC/Asia Pasific Economic Cooperation 52	
III. Berakhirnya Perang Dingin 56	
III.1. Runtuhnya Uni Soviet 57	
III.2. Reunifikasi Jerman 61	
2	
PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN INTEGRITAS NKRI 74	
1. REVOLUSI INDONESIA 74	
2. PERJUANGAN DIPLOMASI MENUJU RIS 89	
3. Refleksi Histori 135	
3	
MASA DEMOKRASI PARLEMENTER 1950 - 1959 140	
1. Pendahuluan 140	
2. Terbentuknya Kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia 141	
3. Kabinet Jatuh Bangun 148	
4. Menghadapi Pemberontakan-pemberontakan pada Awal Tahun 1950-an 159	
5. Peristiwa 17 Oktober 1952 176	
6. Koferensi Asia Afrika 179	

7. Pemilihan Umum Tahun 1955 188	
8. Deklarasi Djuanda (Juanda) 190	
9. Pemberontakan PRRI dan Permesta 194	
10. Kembali ke UUD 1945 196	
11. Penutup 198	

4	
DEMOKRASI TERPIMPIN (1959 - 1967) 203	
A. Pengantar 203	
B. Konsepsi Demokrasi Terpimpin dan Revolusi Soekarno 204	
C. Pemerintahan 211	
D. Angkatan Bersenjata 220	
E. Oposisi dan Konflik 242	
F. Kudeta Gerakan 30 September/PKI yang Gagal 252	
G. De Soekarnoisasi 273	

5	
INDONESIA MASA ORDE BARU 278	
A. Supersemar 278	
B. Dualisme Kepemimpinan 280	
C. Lahirnya Orde Baru 283	
D. Politik Indonesia Masa Orde Baru 285	
E. Pemilihan Umum Masa Orde Baru 289	
F. Rencana Pembangunan Lima Tahun 300	
G. Orde Pembangunan 311	
H. Keberhasilan Orde Baru 314	
I. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 317	
J. Kejatuhan Orde Baru 318	
K. Masa Transisi Orde Baru ke Orde Reformasi 322	
L. Refleksi 323	

6

MASA REFORMASI (1998-SEKARANG) 328

- A. Pendahuluan 328
- B. Perkembangan Politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan di Era Reformasi 336
- C. Masalah Disintegrasi dan Kedaulatan Wilayah 362
- D. Otonomi Daerah 364
- E. Upaya Pemberantasan KKN 365

7

MEMBALIKKAN STIGMA KOLONIAL SEPEREMPAT MANUSIA: INDONESIA DI TENGAH ARUS GLOBALISASI DAN REVOLUSI TEKNOLOGI 381

- A. Konsep, Ciri-ciri, dan Alih Teknologi 385
- B. Dampak Revolusioner Teknologi 399
- C. Teknologi Modern: Ciri dan Evolusinya 405
- D. Globalisasi sebagai Deteritorialisasi 409
- E. Teknokrat Orde Baru dan Konteks Alih Teknologi 420
- F. Revolusi Hijau dan Swasembada Beras 432
- G. Alih Teknologi Dirgantara Nasional dan Industri Pesawat Terbang Nurtanio 437
- H. Globalisasi Ekonomi dan Perusahaan Multinasional 445
- I. Penutup 453

5

INDONESIA MASA ORDE BARU

*Penulis : Dr. Rudy Gunawan, M.Pd.
Pendidikan Sejarah FKIP UHAMKA*

Masa Demokrasi Terpimpin di bawah pimpinan Soekarno dapat dikatakan berakhir dengan munculnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), penangkapan sejumlah menteri yang diduga terlibat G30S dan penggantian Kabinet Dwikora, penolakan terhadap Pidato Nawaksara, aksi-aksi demonstrasi dari mahasiswa, pengumuman mengenai penyerahan kekuasaan sampai dengan pencabutan kekuasaan pemerintah dan pengangkatan Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakan pemilu. Sejak saat itulah Indonesia memasuki masa Orde Baru.

A. Supersemar

Masa Demokrasi Terpimpin di bawah pimpinan Soekarno dapat dikatakan berakhir dengan munculnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) di Istana Bogor, Jawa Barat. Supersemar muncul atas permintaan Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang menyatakan, apabila diberi kepercayaan maka akan mengatasi keadaan yang pada saat itu mengalami krisis politik yang tidak menentu. Pada tanggal 11 Maret 1966 Kabinet Dwikora yang dibentuk tanggal 21 Februari 1966 mengadakan sidang paripurna. Sidang bertujuan untuk mencari jalan keluar dari krisis. Namun sidang diboikot oleh para demonstran dengan melakukan pengempesan ban-ban modul pada jalan-jalan yang menuju istana sehingga Presiden Soekarno yang pada saat itu sedang berpidato memilih untuk meninggalkan sidang dan pergi menuju Bogor (Poesponegoro dan Notosusanto 1984, 409-415).

Pada saat itu Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Urusan Veteran), Brigjen M. Jusuf (Menteri Perindustrian Ringan) dan Brigjen Amirmachmud sepakat menyusul dengan tujuan untuk memberi motivasi kepada Presiden Soekarno dan meyakinkan bahwa ABRI khususnya TNI AD tetap siap sedia mengatasi keadaan asal diberi kepercayaan penuh. Pada saat itu Jenderal Soeharto sedang sakit dan menyetujui keberangkatannya ketiga perwira tersebut dengan menyampaikan pesan "Sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan

saya, Beliau akan mengerti". Di Istana Bogor ketiga perwira tinggi tersebut mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J. Leimena dan Dr. Chairul Saleh sampai munculnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar.

Tindakan pertama yang dilakukan Jenderal Soeharto keesokan harinya adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang bernaung dan berlandung di seluruh wilayah Indonesia (Poesponegoro dan Notosusanto 1984, 413). Jika dibaca secara saksama, Supersemar sama sekali bukan surat pengalihan kekuasaan. Salinan (*copy*) Surat Perintah 11 Maret 1966, yang sesuai aslinya, dimuat di harian Kompas, Senin, 14 Maret 1966, di halaman 3. Itu sebabnya Presiden Soekarno marah ketika Letjen Soeharto menggunakan Supersemar untuk membubarkan PKI. Soekarno mengatakan, Soeharto tidak berhak melakukan itu, walaupun ia menggenggam Supersemar. Pada 13 Maret 1966, Soekarno mengutus Wakil PM III Leimena untuk meminta pertanggungjawaban Soeharto namun tidak menggubrisnya (Pusaka Indonesia 2015). Dengan SP 11 Maret 1966 secara bertahap dan sistematis, Soeharto memotong pilar-pilar penopang kekuasaan Presiden Soekarno dengan membentuk Presidium Kabinet yang langsung ditangani oleh Soeharto. Walau demikian dalam berbagai kesempatan Soeharto tetap menyebut Presiden Soekarno tetap pada fungsinya sebagai Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS (Luhulima 2006, 176). Pada tanggal 6 Juli 1966 sidang MPRS menetapkan kelanjutan dan perluasan penggunaan Supersemar melalui ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.

Isi Supersemar dengan tajuk "Presiden memerintahkan Letdjen Soeharto bertindak menjelamatkan Revolusi" (Kompas 1966) seperti dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Cuplikan Berita tentang Supersemar
Sumber: <https://instagram.com/p/0Fuay1UJiu/>

B. Dualisme Kepemimpinan

Kabinet yang dibentuk oleh Soeharto tanggal 27 Maret 1966 dilantik pada tanggal 30 Maret 1966, walau Presiden Soekarno tidak setuju. Ketidaksetujuan muncul karena orang-orang yang dianggap dekat dengan Presiden diganti dengan wajah baru. Namun pada saat itu Soeharto tetap mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi (Poesponegoro dan Notosusanto 1984, 416). Salah satu tindakan untuk memenuhi dan melaksanakan tritura, dibentuklah Kabinet Ampera sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 dengan tugas pokok memperbaiki kehidupan rakyat serta melaksanakan pemilihan umum.

Sebelumnya, MPRS yang diketuai oleh Jenderal TNI A.H. Nasution mengadakan Sidang Umum ke IV pada tanggal 22 Juni 1966, untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban Presiden yang disebut Pidato Nawaksara yang berarti sembilan pokok masalah. Dari sembilan pokok masalah yang disebutkan masalah G30 S tidak disebutkan sehingga MPRS meminta Presiden untuk melengkapi pidato tersebut. Catatan Sementara tersebut berisikan, antara lain: (a) bahwa Presiden masih meragukan keharusannya untuk memberikan pertanggungjawaban kepada MPRS sebagaimana ditentukan oleh Keputusan MPRS No. 5/MPRS/1966. (b) Perlengkapan Nawaksara ini bisa mengesankan seolah-olah dibuat dengan konsultasi Presidium Kabinet Ampera dan para Panglima Angkatan Bersenjata" (Tempo 1997, <http://tempo.co.id/ang/min/02/05/utama7.htm>).

Permintaan tersebut dilengkapi dan disampaikan kepada MPRS oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Januari 1967 dengan nama Pelengkap Nawaksara (disingkat: Pel Nawaksara). Namun isi Pel Nawaksara tersebut tidak membuat konflik mereda, bahkan sebaliknya cenderung mengarah kepada konflik nasional yang baru sehingga pada tanggal 9 Februari 1997 DPR-GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa.

Usaha untuk mengatasi konflik terus dilakukan, Pimpinan ABRI mengadakan pendekatan pribadi dengan Presiden dan meminta Presiden sebelum sidang umum MPRS untuk menyerahkan kekuasaan kepada pengembal Tap No IX/MPRS/1966 untuk mencegah perpecahan di kalangan rakyat dan juga menyelamatkan lembaga kepresidenan serta pribadi Presiden (Poesponegoro dan Notosusanto 1984, 423). Pada tanggal 16 Februari 1967, Pimpinan MPRS mengeluarkan Keputusan No. 13/B/1967 tentang Tanggapan

Terhadap Pelengkapan Pidato Nawaksara, yang isinya: Menolak pelengkapan Pidato Nawaksara yang disampaikan dengan surat Presiden no. 01/PRES./'67 tanggal 10 Januari 1967, sebagai pelaksanaan keputusan MPRS NO.5/MPRS/1966. Dan pada tanggal yang sama dikeluarkan pula Keputusan MPRS No.14/B/1967 tentang Penyelenggaraan dan Acara Persidangan Istimewa MPRS (Tempo 1997).

Pada tanggal 19 Februari 1967, Presiden Soekarno meminta Jenderal Soeharto bersama Panglima Angkatan untuk berkumpul kembali di Bogor dan menolak menandatangani konsep yang diajukan oleh Jenderal Soeharto mengenai Pernyataan Presiden berhalangan atau Presiden menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pemegang Supersemar. Sore harinya Panglima Angkatan Laut dipanggil oleh Presiden dan menghadap dengan membawa konsep yang sudah dipersiapkan. Presiden menyetujui dengan perubahan-perubahan kecil dan menambah kata-kata menjaga dan menegakkan revolusi di pasal 3. Tanggal 20 Februari 1967 Pangal Mulyadi dan Pangak Sucipto dipanggil menghadap Presiden dan pada hari itu konsep ditandatangani. Presiden meminta agar diumumkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 1967¹ (Poesponegoro dan Notosusanto 1984, 425).

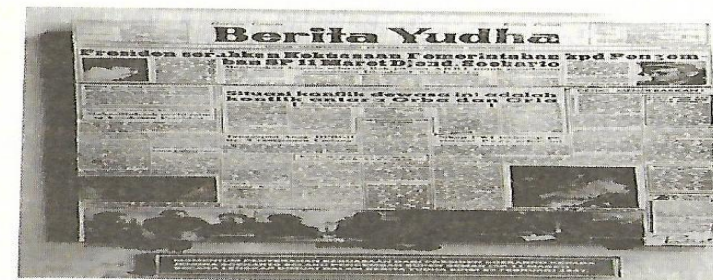
Pada hari Kamis pukul 19.30 bertempat di Istana Negara, dengan disaksikan Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri, Presiden dengan resmi menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto. Isi pengumumannya adalah sebagai berikut:

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, Setelah menyadari bahwa konflik politik yang terjadi dewasa ini perlu segera diakhiri demi keselamatan Rakyat, Bangsa dan Negara, maka dengan ini mengumumkan: Pertama: Kami, Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa Undang-undang Dasar 1945. Kedua: Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada Presiden, setiap waktu dirasa perlu. Ketiga: Menyerukan kepada seluruh Rakyat

1 Berdasarkan wawancara dengan Jenderal Polisi Sutjipto di Jakarta tanggal 2 Juli 1971

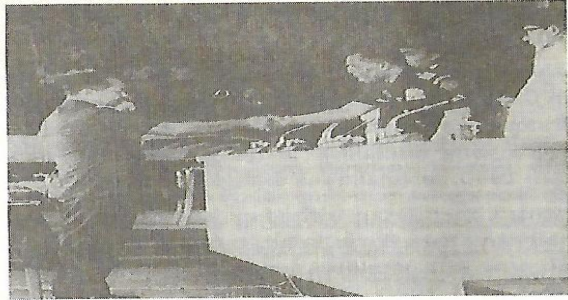
Indonesia, para Pemimpin Masyarakat, segenap Aparatur Pemerintahan dan seluruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan, menjaga dan menegakkan revolusi dan membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 seperti tersebut diatas. Keempat: Menyampaikan dengan penuh rasa tanggung-jawab pengumuman ini kepada Rakyat dan MPRS. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi Rakyat Indonesia dalam melaksanakan cita-citanya mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila (Poesponegoro dan Notosusanto 1984, Tempo 1997).

Penyerahan kekuasaan ini dimuat dalam Berita Yudha tanggal 23 Februari 1967 dengan judul "Presiden serahkan Kekuasaan Pemerintahan kpda Pengemban SP 11 Maret Djen. Soeharto." Dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2 Cuplikan Penyerahan Kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto
Sumber: <http://muspen.kominfo.go.id/images/137.%20sk%20berita%20yudha.jpg>

Akhir kekuasaan Soekarno diperkuat dengan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 melalui sidang istimewa pada 12 Maret 1967 yang mengangkat Letjen Soeharto sebagai Pejabat Presiden, sehingga sebagai simbol pun Soekarno tidak diakui sebagai pemegang kekuasaan (Poesponegoro dan Notosusanto 1984, 415).



Gambar 1. Pelantikan Jenderal Soeharto menjadi Pejabat Presiden
Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:NasutionSubarto1967.jpg>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka turunnya Presiden Soekarno disebabkan oleh naik turunnya hubungan politik dan pribadi serta semakin kerasnya tuntutan pada dirinya untuk mengundurkan diri. Bagi Soekarno keutuhan negara dan terpulihkannya keamanan anak bangsa adalah segala-galanya. Tiada berarti sebuah kekuasaan jika disintegrasi dalam kehidupan anak bangsa dibiarkan berlarut-larut sehingga berakhir pada kesimpulan demi keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah waktunya ia mengundurkan diri. Sang Proklamator menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia pada tahun 1967 dan setahun kemudian pada tahun 1968 Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia (Kemdikbud 2014, 91)

C. Lahirnya Orde Baru

Kutipan dari Pidato Pejabat Presiden Soeharto pada Sidang Paripurna Kabinet Ampera Tanggal 19 April 1967 menyatakan "Orde Baru juga bisa diartikan sebagai masyarakat yang tertib dan negara yang berdasarkan hukum, dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta warga negara mempunyai pemimpin atau penguasa yang tunduk pada ketentuan yang berlaku (Soeharto, Pidato Pejabat Presiden: Orde Baru 1967, 7). Hal ini berarti pemerintah Orde Baru menginginkan penegakan

hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dengan diberi contoh oleh pemimpinnya.

Dalam salah satu pidatonya yang lain, Soeharto menyebutkan bahwa yang melahirkan Orde Baru adalah untuk melakukan koreksi secara mendasar terhadap kekeliruan masa lampau. Orde Baru adalah tatanan kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diungkap dalam kutipan berikut:

"Koreksi secara mendasar terhadap kekeliruan masa lampau itulah yang melahirkan Orde Baru. Ialah, tatanan kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang kita letakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Sejarah lahirnya Orde Baru ini harus kita camkan sedalam-dalamnya dalam lubuk hati dan kesadaran kita semua tanpa kecuali" (Departemen Pertanian 1994, 6).

Masa Orde Baru dibangun dengan dukungan penuh dari kelompok-kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu di bidang politik, ekonomi dan budaya pada masa sebelumnya. Menurut Moertopo (2004, 48) pembangunan pemerintah pada awal Orde Baru berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun sehingga program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah berjalan kurang lancar.

Penyusunan agenda Orde Baru dibantu oleh militer, hal ini nampak pada hasil yang dirumuskan pada Seminar II Angkatan Darat pada bulan Agustus 1966 seperti yang diungkapkan oleh Notosusanto (1985, 31) mengenai pengertian, ciri-ciri dan hakekat Orde Baru. Orde Baru menghendaki suatu tata fikir yang lebih realistis dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan anti kolonialisme dan anti imperialisme. Orde Baru menginginkan suatu tata susunan yang lebih stabil, berdasarkan kelembagaan dan bukan tata susuna yang dipengaruhi oleh oknum-oknum yang mengembangkan kultur individu. Orde Baru menghendaki kepemimpinan dan pemerintahan yang kuat dalam masa peralihan dan pembangunan, mengutamakan konsolidasi ekonomi dan sosial dalam negeri, pelaksanaan yang sungguh-sungguh dan cita-cita demokrasi ekonomi. Orde Baru

merupakan suatu tata kehidupan baru disegala bidang yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

D. Politik Indonesia Masa Orde Baru

Setelah Soeharto menjadi pejabat presiden pada tahun 1967, Nasution dipilih menjadi Ketua MPRS, lembaga tertinggi negara di Indonesia yang terdiri dari anggota DPR, wakil-wakil golongan fungsional dan daerah, yang berfungsi memilih presiden dan wakilnya, mengubah undang-undang dasar serta menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang harus dilaksanakan presiden. Penetapan GBHN dianggap menjadi ancaman utama bagi Soeharto sehingga Jusuf Wanandi² merasa perlu untuk mengingatkan Soeharto untuk hal ini:

“Masalah ini berkisar sekitar Nasution. Saya merasa Nasution tidak pernah memaafkan Soeharto karena mengambil jabatan presiden. Mungkin Nasution memiliki ambisi juga, tetapi setelah Soeharto melakukan konsolidasi kekuatannya pada tahun 1967, kesempatan Nasution untuk bersaing dengan Soeharto semakin kecil. Sidang Umum MPRS 1968 menjadi medan pertempuran. Nasution ingin MPRS mengendalikan Soeharto, dengan memastikan agar pimpinan MPRS bersama Badan Pekerja MPRS tetap bekerja dan aktif selama masa kerja mereka, dan menuntut agar presiden melapor kepada MPR setiap tahun. Menurut alur pemikiran ini, seorang presiden dapat dikendalikan. Kami sebagai pendukung Soeharto ketika itu menganggap bahwa DPR adalah lembaga pengawas dan pembuat undang-undang yang bersama dengan lembaga eksekutif mempersiapkan anggaran belanja negara. MPRS, menurut kami, hanya berfungsi dan melaksanakan tugasnya pada sidang umum saja, dan tidak di luar itu. Pimpinan hanya memimpin sidang, sementara Badan Pekerja yang harus mempersiapkan sejumlah ketetapan yang akan disahkan oleh MPRS. Tidak lebih, tidak kurang” (Wanandi 2014, 108-109).

2 Jusuf Wanandi adalah seorang aktivis berlatar pendidikan hukum dan salah satu pendiri *Centre for Strategic and International Studies*. Berperan sebagai orang dalam di lingkaran politik yang berpuluh tahun bekerja dengan para penasihat utama Presiden sehingga dapat menceritakan beberapa peristiwa dalam sejarah modern Indonesia sejak jaman Orde Baru

Setelah melalui perdebatan panjang di dalam sidang MPRS, akhirnya pada pukul 03.00 tanggal 8 Maret 1968, Soeharto dilantik sebagai presiden (Wanandi 2014, 114). Sidang MPRS tahun 1968 dapat dianggap sebagai titik tolak perkembangan politik di era Soeharto. Untuk pertama kalinya front bersama yang dibentuk tahun 1965 untuk melawan PKI dan Soekarno pecah menjadi dua kubu walau garis perbedaan di antara kedua kubu itu tidak terlalu jelas karena para anggotanya selalu berganti keberpihakan yaitu yang mendukung Presiden Soeharto dan yang menentangnya.

Peristiwa ini juga menjadi awal titik tolak perjuangan politik di MPRS dan bukan di jalanan maupun melalui gerakan militer. Pertama kalinya Soeharto mengambil kepemimpinan politik dengan mengambil keputusan untuk menolak usulan Badan Pekerja MPRS berdasarkan saran kelompoknya. Soeharto melangkah ke MPRS sebagai seoran neophyte dalam dunia politik, seseorang yang masih baru dan lulus sebagai politikus penuh dan berhasil mengatasi masalah-masalah politik yang muncul (Wanandi 2014, 115).

Sesuai dengan amanat MPRS, maka pemilihan umum harus diselenggarakan dalam tahun 1968 sedang undang-undang yang mengaturnya belum ada, maka Pejabat Presiden di depan DP-MPRS pada tanggal 29 Februari 1968 memberikan penjelasan (Poesponegoro dan Notosusanto 1984, 420). Kemanfaatan dan tujuan pemilihan umum ialah menciptakan stabilisasi politik untuk melaksanakan wujud demokrasi yang sehat. Pelaksanaan pemilihan umum paling cepat dapat diselenggarakan dalam jangka waktu setengah tahun sesudah diundangkan dengan tujuan untuk menyegarkan DPRGR dan MPRS agar mendekatkan kedudukannya kepada masyarakat yang diwakilinya serta mencerminkan perkembangan-perkembangan yang terjadi. Dengan adanya tindakan penyegaran terhadap lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimaksudkan agar rencana Pembangunan Nasional mendapat dukungan luas dari semua lapisan masyarakat³. Terdapat 3 (tiga) masalah nasional yang meminta perhatian pada masa transisi ini yaitu (Poesponegoro dan Notosusanto 1984, 421):

1. Berusaha memperkuat pelaksanaan sistem konstitusional, menegakkan hukum dan menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat sebagai syarat untuk mewujudkan stabilisasi politik.

3 Baca penjelasan Pj. Presiden mengenai masalah nasional yang penting dan mendesak di depan DP-MPRS tanggal 29 Februari 1968.

2. Melaksanakan pembangunan lima tahun yang pertama sebagai usaha untuk memberi isi kepada kemerdekaan.
3. Tetap waspada terhadap bahaya laten PKI.
4. Peningkatan mutu pegawai serta pemberantasan korupsi.
5. Mengembalikan Kepolisian RI pada fungsinya semula yaitu sebagai alat ketertiban masyarakat dan penegak hukum.

Setelah Soeharto diangkat sebagai presiden penuh, maka konsolidasi politik militer semakin mantap. Horald Crouch⁴ (1986) dalam (Syabirin 2014, 53-56) mencatat ada beberapa bentuk konsolidasi yang dilakukan oleh Soeharto yaitu:

1. Menggantikan pimpinan militer di seluruh jajaran ABRI yang terbukti tidak bersih terhadap gerakan 30 S/PKI baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Menggeser kaum militan Orde Baru ke posisi yang dipandang kurang penting supaya tidak mengganggu pelaksanaan strategi Soeharto dalam melakukan perubahan.
3. Mensentralisasikan organisasi ABRI ke bawah komando tunggal yaitu Panglima ABRI (Pangab). Sehingga tidak lagi memungkinkan terjadinya perpecahan dalam angkatan bersenjata. Saat itu Soeharto selain presiden juga Panglima Kopkamtib dan Pangti ABRI.
4. Mengeliminasi kemungkinan Jendral A.H. Nasution untuk menduduki posisi puncak dalam militer dan negara dengan cara mengpensunkan Nasution sesuai dengan usianya memasuki pensiun.
5. Mendemisionerkan MPRS.

Menurut William Liddle⁵ (1992) dalam (Kasenda 2013, 44-45) ada tiga pilar utama keabsahan Orde Baru yaitu dwifungsi, Supersemar dan UUD 1945, seperti yang dijelaskan berikut:

Dwifungsi merupakan jaminan bahwa Indonesia akan tetap menjadi negara Pancasila. Pemimpin ABRI mengklaim sebagai pembela nasionalisme Indonesia dengan citra lebih dekat dengan rakyat ketimbang dengan politisi. Sejak kemerdekaan mereka terpanggil membela kepentingan rakyat dari

4 Harold Crouch. *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm 248-275. Lihat juga Jend. A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid 8 (Jakarta: Gunung Agung, 1985)

5 Baca buku R. William Liddle. *Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia di Awal Orde Baru*. Jakarta

penyelewengan-penyelewengan kaum kanan (Islam Politik) dan kaum kiri (komunisme). Ideologi negara Pancasila sekarang ditafsirkan dengan pengertian di tengah yang mengandung semua kekuatan dan tanpa kelemahan kiri maupun kanan.

Supersemar adalah dokumen tahun 1966 yang ditandatangani Presiden Soekarno yang memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan menjaga ketertiban dan mengamalkan Revolusi. Dengan demikian, dokumen ini menghubungkan Soeharto dengan keabsahan revolusioner Soekarno sebagai pendiri Republik, membuatnya lebih dari sekedar seorang jenderal yang berada di tempat yang tepat dan pada saat yang tepat serta menempatkan dirinya di atas semua jenderal yang juga merupakan ahli waris dwifungsi.

UUD 1945 dengan mengkhususkan lagi status konsitusional MPR sebagai wujud kedaulatan rakyat dimana pada tahun 1966, Soeharto mempunyai MPRS, yang mendukung ke arah jalannya menjadi presiden penuh. Soeharto menciptakan landasan konstusional kekuasaan yang telah digenggam dan dijalankan sejak Oktober 1965. Soeharto mengikat diri pada format politik dimana sebagai Presiden bertanggungjawab kepada MPR dan setiap lima tahun sekali dipilih kembali oleh mayoritas anggota MPR.

Pada awal Orde Baru muncul kesepakatan masyarakat, partai politik, ABRI dan pemerintah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kesepakatan ini disebut sebagai Konsensus Nasional⁶ (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI 2000, 186). Beberapa pendapat tentang tepatnya Konsensus Nasional ini lahir beragam karena muncul dari dialog masyarakat pada waktu yang tidak sama. Pendapat Idham Chalid, Harry Tjan Silalahi dan Sunawar Sukowati menyebutkan bahwa Konsensus Nasional lahir pada masa awal Orde Baru, jadi dalam tahun 1966 atau bulan-bulan pertama tahun tersebut. A.H. Nasution mengatakan bahwa Konsensus Nasional tersebut dilembagakan dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966, jadi lahir dalam masa antara terjadinya G.30.S/PKI dan diselenggarakannya Sidang Umum IV MPRS yakni antara tanggal 1 Oktober 1965 dan tanggal 5 Juli 1966⁷. Konsensus yang dihasilkan ada dua yaitu:

6 Lihat Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *Sejarah Singkat Perjuangan ABRI 1945-1990*, Pusjarah ABRI, Jakarta 1990 halaman 134

7 Lihat lebih lanjut pada tulisan Nugroho Notosusanto (Editor), *Tercapainya Konsensus Nasioanl 1966-1969*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hal. 85

1. Konsensus Utama yaitu kebulatan tekad masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
2. Konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsensus utama dan tercapai antara partai-partai politik dan pemerintah. Konsensus kedua dihasilkan kurang lebih 3 tahun dimulai pada bulan November 1966 ketika pemerintah menyampaikan tiga rancangan Undang-undang kepada DPRGR yaitu:
 - a. RUU tentang Kepartaian
 - b. RUU tentang Pemilihan Umum/anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - c. RUU tentang susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

E. Pemilihan Umum Masa Orde Baru

Selama pemerintahan Orde Baru telah diselenggarakan 6 (enam) kali pemilu, yaitu Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992 dan Pemilu 1997. Keberkalaan pemilu lima tahun sekali kecuali pada Pemilu 1977 ini secara formal merupakan prestasi luar biasa. Apalagi dengan adanya tingkat partisipasi hampir mendekati 90 persen pada setiap pelaksanaan pemilu (Kasenda 2013, 11).

Menghadapi pemilihan umum yang pertama, persiapan-persiapan mulai dilaksanakan. Pada tanggal 23 Mei 1970, Presiden dengan surat keputusan no. 43 telah menetapkan organisasi-organisasi yang dapat ikut serta dalam pemilihan umum dan anggota DPR/DPRD yang diangkat. Organisasi politik yang dapat ikut dalam pemilu adalah partai politik yang sudah ada dan memiliki wakil di DPR/DPRD yaitu: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Nahdhatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam (PI Perti), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) ditambah dengan organisasi golongan karya yaitu Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) (Poesponegoro dan Notosusanto 1984, 427).

Memasuki tahun 1971, suasana politik lebih banyak dicurahkan kepada kegiatan kampanye menghadapi pemilihan umum yang kedua dalam sejarah Republik Indonesia dan pertama pada jama Orde Baru. Menurut data dari Kompas tanggal 9 Agustus 1971, pemilihan umum kedua yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971 menghasilkan perhitungan kursi di DPR RI dengan urutan-urutan sebagai berikut: 1. Golkar dengan perolehan 227 kursi, 2. NU dengan perolehan 58 kursi dan 3. PNI dengan perolehan 20 kursi (Poesponegoro dan Notosusanto 1984, 428).

Pada tahun 1971, pemerintah melemparkan gagasan penyederhanaan partai-partai dengan mengadakan pengelompokan partai (Poesponegoro dan Notosusanto 1984, 429). Penataan kehidupan politik serius dilakukan oleh pemerintah karena menurut penguasa ada tujuh kesalahan partai-partai selama ini, seperti yang disimpulkan oleh William Liddle (1992) dalam (Syabirin 2014, 57-59) yaitu:

1. Partai-partai lebih berorientasi kepada ideologi masing-masing sehingga kemerdekaan terlupakan. Dalam perdebatan konstituante ada dua aliran besar yang berpolemik yaitu Islam versus sekuler.
2. Partai-partai memperuncing ketegangan ideologi di kalangan rakyat Indonesia. Dalam memperoleh dukungan, partai politik telah membesar-besarkan perbedaan budaya yang menyebabkan kerukunan nasional rusak seperti munculnya di kalangan santri dengan adanya kelompok tradisional (NU) versus modernis (Masyumi).
3. Partai-partai menciptakan berbagai ketegangan organisasi di dalam masyarakat. Pimpinan partai berupaya mengembangkan loyalitas anggotanya kepada partai yang mengakibatkan hambatan pada proses pembangunan.
4. Menurut penilaian militer pada saat itu, pimpinan partai adalah orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi, kelompok atau partainya dan tidak berpikir untuk kepentingan umum walaupun sebenarnya loyalitas kepada partai harus berakhir saat mereka memimpin pemerintahan.
5. Para pemimpin partai terpisah dari pemilih yang mestinya mereka wakili. Banyak pemimpin partai yang dianggap sebagai kelompok oportunis dengan mencari keuntungan pribadi atas nama rakyat pemilih. Pemilih hanya memilih berdasarkan alasan budaya, loyalitas komunal

atau berhunungan saudara dan tokoh karismatik yang berada di partai tersebut.

6. Kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem tidak terbatas pada partai saja tapi telah merembet kedalam birokrasi pemerintahan. Pemerintah kemudian membelakukan kebijakan pembersihan birokrasi dari bias politik.
7. Dalam pandangan penguasa sistem banyak partai sebagai sebab utama ketidaksabihan politik selama ini. Karena itu sistem banyak partai dianggap tidak cocok dengan UUD 1945 dan kepribadian Indonesia.

Partai-partai yang dibiarkan berdiri mendapat pengawasan ketat dari pemerintah. Pimpinan partai yang dianggap telah ternoda oleh ideologi Orde Lama diganti dengan generasi muda yang bersih. Partai politik sudah diformat sesuai dengan semangat pemerintah dalam pemilu 1971 ternyata sangat lemah dan tidak berdaya. Dengan demikian penyederhanaan partai ke dalam dua kelompok partai sebagai pendamping Golkar semakin mantap, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai fusi dari 4 partai Islam (NU, Parmusi, Perti dan PSII) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai fusi dari partai-partai sekuler dan Kristen (PNI, Parkindo, Murba, IPKI dan Katolik) (Syabirin 2014, 62). Sistem pemilu selama Orde Baru dapat dilihat pada penjelasan berikut ini (Komisi Pemilihan Umum 2010, 6-11):

1. Pemilu 1971

a. Tanggal Pelaksanaan

Pemilu 1971 merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan bangsa Indonesia. Pemilu 1971 dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan ini berkuasa. Pemilu yang dilaksanakan pada 5 Juli 1971 ini diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR.

b. Sistem Pemilu

Sistem Pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu.

c. Asas Pemilu

Pemilu 1971 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER).

1. Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan.
2. Umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih.
3. Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nuraninya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.
4. Rahasia, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya.

d. Dasar Hukum

1. TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
2. TAP MPRS No. XLII/MPRS/1966
3. UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
4. UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

e. Penyelenggara Pemilu

Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3

Tahun 1970. LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri atas Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, Sekretariat Umum LPU dan Badan Perbekalan dan Perhubungan. Struktur organisasi penyelenggara di pusat, disebut Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), di provinsi disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I), di kabupaten/kotamadya disebut Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, di kecamatan disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan di desa/kelurahan disebut Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih). Untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dibentuk Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS). Bagi warga negara RI di luar negeri dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPSLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang bersifat sementara (*ad hoc*).

f. Peserta Pemilu

1. Partai Nahdlatul Ulama
2. Partai Muslim Indonesia
3. Partai Serikat Islam Indonesia
4. Persatuan Tarbiyah Islamiyah
5. Partai Nasionalis Indonesia
6. Partai Kristen Indonesia
7. Partai Katholik
8. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
9. Partai Murba
10. Sekber Golongan Karya

2. Pemilu 1977

a. Tanggal Pelaksanaan

Pemilu kedua pada pemerintahan Orde Baru ini diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977.

b. Sistem Pemilu

Sama halnya dengan Pemilu 1971, pada Pemilu 1977 juga menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

c. Asas Pemilu

Pemilu 1977 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

d. Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
2. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum.
3. Undang-undang Nomor 3/1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
4. Undang-undang Nomor 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.
5. Undang-undang Nomor 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
6. Undang-undang Nomor 5/1979 tentang Pemerintahan Desa.

e. Penyelenggara Pemilu

Pemilu 1977 diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu yang memiliki struktur yang sama dengan penyelenggaraan pada tahun 1971, yaitu PPI ditingkat pusat, PPD I di provinsi, PPD II di kabupaten/kotamadya, PPS di kecamatan, Pantarlih di desa/kelurahan, dan KPPS. Bagi warga negara Indonesia di luar negeri dibentuk PPLN, PPSLN, dan KPPSLN yang bersifat sementara (*ad hoc*).

f. Peserta Pemilu

Pada Pemilu 1977, ada fusi atau peleburan partai politik peserta Pemilu 1971 sehingga Pemilu 1977 diikuti 3 (tiga) peserta Pemilu, yaitu :

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi/penggabungan dari: NU, Parmusi, Perti, dan PSII.
2. Golongan Karya (GOLKAR).
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan fusi/penggabungan dari: PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba.

3. Pemilu 1982

a. Tanggal Pelaksanaan

Pemilu 1982 merupakan pemilu ketiga yang diselenggarakan pada pemerintahan Orde Baru. Pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982

b. Sistem Pemilu

Sistem Pemilu 1982 tidak berbeda dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1971 dan Pemilu 1977, yaitu masih menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional).

c. Asas Pemilu

Pemilu 1982 dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia.

d. Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1978 Tentang Pemilu.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

e. Penyelenggara Pemilu

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1982 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1977, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih, dan PPS serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

f. Peserta Pemilu

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
2. Golongan Karya (Golkar).
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

4. Pemilu 1987

a. Tanggal Pelaksanaan

Pemilu keempat pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987.

b. Sistem Pemilu

Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1987 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1982, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

c. Asas Pemilu

Pemilu 1987 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

d. Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum.
2. UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

e. Penyelenggara Pemilu

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1987 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1982, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

f. Peserta Pemilu

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
2. Golongan Karya (Golkar).
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

5. Pemilu 1992

a. Tanggal Pelaksanaan

Pemilu kelima pada pemerintahan Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992.

b. Sistem Pemilu

Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1992 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1987, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

c. Asas Pemilu

Pemilu 1992 dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia

d. Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilu.
2. UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1990

e. Penyelenggara Pemilu

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1992 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1987, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

f. Peserta Pemilu

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
2. Golongan Karya (Golkar).
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

6. Pemilu 1997

a. Tanggal Pelaksanaan

Pemilu keenam pada pemerintahan Orde Baru ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997.

b. Sistem Pemilu

Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1997 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1992, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.

c. Asas Pemilu

Pemilu 1997 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia

d. Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1993 tentang Pemilu.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985

e. Penyelenggara Pemilu

Struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1997 sama dengan struktur organisasi penyelenggara Pemilu 1992, yaitu terdiri dari PPI, PPD I, PPD II, PPS, Pantarlih dan KPPS, serta PPLN, PPSLN, dan KPPSLN.

f. Peserta Pemilu

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
2. Golongan Karya (Golkar).
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Secara ringkas, sistem pemilihan umum mulai tahun 1971 s.d. 1997 dapat dilihat pada tabel berikut:

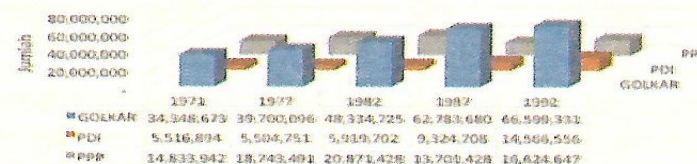
Tabel 1 Pemilihan Umum Masa Orde Baru

Tanggal Pelaksanaan	5 Juli 1971	2 Mei 1977	4 Mei 1982	23 April 1987	9 Juni 1992	29 Mei 1997
Sistem Pemilu	Sistem Perwakilan Berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel					
Asas Pemilu	Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER)					
Dasar Hukum	1) TAP MPRS No. XI/MPRS/1966 2) TAP MPRS No. XLII/MPRS/1966 3) UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat. 4) UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.	1) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 2) Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum dan Hubungan Luar Negeri 3) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum. 4) Undang-undang Nomor 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. 5) Undang-undang Nomor 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. 6) Undang-undang Nomor 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 7) Undang-undang Nomor 5/1979 tentang Pemerintahan Desa.	1) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilu. 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976	1) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum. 2) UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985. 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1990.	1) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilu. 2) UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1980. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985. 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1990.	1) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1993 tentang Pemilu. 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
Penyelenggara Pemilu	Lembaga Pemilihan Umum (LPU)	Badan Penyelenggara Pemilu				
Peserta Pemilu	1) Partai Nahdlatul Ulama 2) Partai Muslim Indonesia 3) Partai Serikat Islam Indonesia 4) Persatuan Tarbiyah Islamiyah 5) Partai Nasionalis Indonesia 6) Partai Kristen Indonesia 7) Partai Katolik 8) Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 9) Partai Murba 10) Sekber Golongan Karya	1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2) Golongan Karya (GOLKAR). 3) Partai Demokrasi Indonesia (PDI)				

Sumber: (Komisi Pemilihan Umum 2010, 6-11)

Hasil pemilihan umum sejak tahun 1971 s.d 1992 dapat dilihat pada gambar berikut:

Hasil Pemilihan Umum 1971-1992



Sumber: Syafii Anwar (1995) dalam (Syabirin 2014, 62)

F. Rencana Pembangunan Lima Tahun

Pada masa pemerintahan Orde Baru pembangunan di Indonesia dilaksanakan secara terencana dimulai sejak Repelita I (1 April 1969), yang tertuang dalam strategi besar pembangunan nasional berupa Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (PU-PJP) yaitu PU-PJP I (1969-1994) dan PU-PJP II (1994-2019). Dalam PU-PJP I, pembangunan dilaksanakan melalui lima serangkaian Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Repelita I dimulai dari tahun 1969/1970 s.d. 1973/1974, Repelita II dimulai tahun 1974/1975 s.d. 1978/1979, Repelita III Tahun 1979/1980 s.d. 1983/1984, Repelita IV tahun 1984/1985 s.d. 1988/1989, Repelita V Tahun 1989/1990 s.d. 1993/1994 dan Repelita VI dari tahun 1994/1995 s.d. 1998/1999 (Bappenas 2009, <http://www.bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-lima-tahun-repelita/>).

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I 1969-1973 termuat dalam buku I, II dan III, merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun seperti yang ditugaskan oleh MPRS (Lampiran Keputusan Presiden RI No. 319 1968, Pasal 1). Repelita I bertujuan untuk menaikkan taraf kehidupan rakyat banyak dan yang sekaligus meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi Pembangunan Nasional dan disusun dengan pendekatan yang realistis dan pragmatis serta berlandaskan pada aspirasi-aspirasi rakyat. Sasaran pembangunan yang hendak dicapai adalah

pangan, sandang, perbaikan prasarana, perusmahan rakyat, perluasaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan rohani.

Dalam melaksanakan pembangunan ini maka titik beratnya dipusatkan pada bidang pertanian dengan berdasarkan pada strategi pembangunan untuk mendobrak keterbelakangan ekonomi. Keadaan iklim, tanah dan persediaan tenaga kerja serta adanya teknologi, bibit dan cara-cara baru dalam pertanian dapat berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan produksi pertanian tidak terbatas pada peningkatan jumlah beras tetapi juga peningkatan mutu dan produksi perkebunan yang dapat dieskpor sehingga dapat menambah devisa. Hasil devisa dapat digunakan untuk mengimpor barang-barang modal dan alat-alat perlengkapan yang berguna bagi pembangunan.

Strategi pembangunan Repelita I meliputi tiga pokok bidang yang strategis yaitu pertanian, industri dan pertambangan serta prasarana, dimana pertumbuhan masing-masing sektor akan saling terkait sehingga akan bermuara pada kebutuhan tenaga kerja serta tenaga ahli. Dalam usaha meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, maka pemerintah melakukan program-program seperti transmigrasi dan usaha bantuan pangan dari luar negeri untuk upah kerja. Program lainnya adalah keluarga berencana untuk mengurangi kecepatan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Prioritas lainnya adalah perencanaan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan (Lampiran Keputusan Presiden RI No. 319 1968). Perhatian yang sama besarnya diberikan pada bidang agama, hukum, dan ekonomi sehingga setiap warga negara dapat maju ekonominya, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan dan beragama serta dapat menumbuhkan kesadaran hukum, dan mendapatkan jaminan dan kepastian hukum.

Repelita II dimulai dari tahun 1974 dengan dikeluarkannya Kepres No. 11 Tahun 1974 tentang Repelita II 1974/75 – 1978/79. Pada saat pelaksanaan Repelita I berakhir dengan segala hasil jerih payah yang dicapai saat itu, maka terbukalah kesempatan baru yang lebih luas bagi rakyat Indonesia untuk melanjutkan langkah perjuangan dalam pembangunan bangsa dan negara (Lampiran Keputusan Presiden Nomor 11 1974). Tujuan Repelita II adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dan meletakkan landasan yang kuat untuk tahap berikutnya. Selain itu di Repelita II digarap masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan pada saat Repelita

I seperti perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, pembagian hasil pembangaunan, perbaikan struktur pasar yang masih pincang, peningkatan laju perkembangan ekonomi di wilayah transmigrasi, peningkatan partisipasi rakyat melalui koperasi, masalah pendidikan serta masalah sosial lainnya.

Perencanaan dan pelaksanaan program-program di Repelita II dijiwai oleh lima azas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam GBHN yaitu azas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, demokrasi, adil dan merata serta perikehidupan dalam keseimbangan. Dengan memperhatikan azas-azas tersebut maka pembangaunan nasional tidak akan sekedar diarahkan kepada tercapainya hasil-hasil fisik dan kesejahteraan material semata tetapi juga pembinaan faktor manusianya dengan bersumber pada tata dasar dan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Di Repelita II selain memantapkan stabilitas ekonomi juga memantapkan stabilitas di bdiang politik.

Kelangsungan dan pemantapan stabilitas politik akan terjamin, apabila aspirasi dan cita-cita bangsa serta cara-cara mencapai cita-cita itu dapat dilaksanakan berdasarkan kesepatan dan keputusan bersama dari seluruh bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Lampiran Keputusan Presiden Nomor 11 1974, 28). Pembinaan hubungan fungsional antara lembaga Tertinggi Negara dapat berfungsi dengan baik demi keserasian dan kedayagunaan hubungan antara MPR dengan Presiden selaku Mandararis MPR serta hubungan Presiden dengan lembaga tinggi lainnya. Peningkatan partisipasi Rakyat dilakukan juga termasuk ABRI sebagai kekuatan sosial dalam pelaksanaan tugas-tugas nasional, dengan melaksanakan inti terpenting dari Demokrasi Pancasila yaitu keikutsertaan rakyat.

Bertolak dari hasil-hasil yang telah dicapai dalam Repelita I dan kesinambungan pembangunan yang telah menjadi patokan, maka dalam Repelita II telah ditingkatkan hasil-hasil positif yang telahdicapai selama Repelita I sambil menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan sejauh mungkin menghindarkan akibat-akibat negatif yang timbul bersama dengan hasil-hasil tersebut. Dengan memperhatikan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam Repelita II, maka terciptalah keadaan yang mantap untuk memulai Repelita III pada 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984 (Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 7 1979, 18). Berbagai bidang yang belum sepenuhnya dapat dipecahkan dalam Repelita II seperti peningkatan laju pembangunan ,di daerah-daerah tertentu, peningkatan kemampuan yang lebih cepat dari golongan ekonomi lemah, pembinaan koperasi, peningkatan

produksi pangan dan kebutuhan pokok lainnya, transmigrasi, perumahan, perluasan fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan dan berbagai masalah sosial lainnya akan diberikan perhatian yang lebih mendalam di Repelita III. Tujuan Repelita III adalah:

1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil.
2. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan berpegang teguh kepada petunjuk GBHN, maka pelaksanaan Repelita III dilanjutkan dengan berlandaskan pada Trilogi Pembangunan yang meliputi:

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dalam Repelita III pemerataan pembangunan dan pembagian hasilnya akan tercermin pada setiap kebijaksanaan pembangunan yang menuju terciptanya keadilan sosial dan dituangkan dalam 8 (delapan) jalur pemerataan, yaitu (Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 7 1979, 21):

1. pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan;
2. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan;
3. pemerataan pembagian pendapatan;
4. pemerataan kesempatan kerja;
5. pemerataan kesempatan berusaha;
6. pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita;
7. pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air;
8. pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Pemerintah melakukan langkah-langkah pemerataan di seluruh wilayah Indonesia terutama untuk pangan dengan mengusahakan tersedianya 9 bahan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak terutama

peningkatan jumlah produksi beras dan perbaikan gizi. Bidang pertanian masih menjadi prioritas utama di Repelita III dengan usaha peningkatan hasil produksi beras per hektar tanah. Selain kebutuhan pangan, kebutuhan sandang diyakini akan terpenuhi dari produksi dalam negeri sementara untuk memenuhi kebutuhan perumahan, pemerintah menyediakan kemudahan dalam membangun perumahan rakyat yang sederhana, murah dan yang dapat menjamin kesehatan serta kesejahteraan keluarga melalui PERUMNAS.

Pemerataan di bidang pendidikan dititikberatkan pada perluasan pendidikan dasar dengan program wajib belajar dengan menambah kesempatan belajar pada tingkat SD/MI sehingga seluruh anak usia 7-12 tahun dapat mengikuti proses belajar di SD/MI. Selain itu dibuat program pemberantasan buta huruf dan program kerja sambil belajar sehingga orang dewasa yang kurang mendapat pendidikan dapat menambah keterampilan kerjanya. Dalam bidang kesehatan, pemerintah akan menambah Puskesmas dengan pembagian 1 puskesmas untuk 30.000 penduduk. Selain itu juga dibangun Rumah Sakit Umum bagi kabupaten/kotamadya yang belum memiliki rumah sakit.

Pemerataan pendapatan dilakukan pemerintah dengan melakukan usaha-usaha guna mempertinggi penghasilan kelompok masyarakat dengan mata pencaharian yang mempunyai pengasilan yang rendah sehingga mengurangi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Kebijakan dan langkah-langkah kegiatan akan diarahkan kepada terwujudnya pola hidup sederhana dan rasional ekonomis yaitu tatanan hidup bermasyarakat dan lingkungan sehari-hari, saling tenggang rasa dengan menyesuaikan pendapatan dan kebutuhan secara rasional. Pemerataan pendapatan untuk petani dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada petani untuk mengusai tanah pertanian yang diperlukan mulai dari hak sewa sampai dengan hak milik. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan ketentuan hak atas tanah sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah terutama petani (Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 7 1979).

Prioritas lainnya dalam Repelita III adalah pemerataan kesempatan kerja dengan mempercepat pertumbuhan lapangan kerja. Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang mendesak sehingga diperlukan berbagai kebijakan yang dapat menciptakan kegiatan kerja, pembangunan industri, pembangunan sarana dan prasarana, pemilihan teknologi tepat guna dan

lain sebagainya sehingga dapat mengurangi pengangguran. Penekanan kebijaksanaan kesempatan kerja ditekankan pada Proyek Padat Karya Gaya Baru yang bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja produktif dalam pembangunan atau rehabilitasi sarana ekonomi yang akan dilaksanakan di kecamatan-kecamatan yang tergolong miskin dan relatif padat penduduk.

Program transmigrasi tetap dilakukan yang bertujuan untuk meningkatkan penyebaran penduduk dan tenaga kerja, pembukaan dan pengembangan daerah produksi serta pertanian baru dalam rangka pembangunan daerah. Penyelenggaraan transmigrasi bersifat lintas sektoral sehingga pemerintah dapat melakukan persiapan dengan matang mengenai penyediaan tanah garapan, penyelesaian masalah kepemilikan tanah serta pembangunan yang mencukupi.

Kesempatan berusaha dilakukan pemerintah dengan menciptakan iklim yang sehat seperti mengusahakan ketentraman dan keamanan usaha serta menyederhanakan prosedur perijinan terutama untuk pengusaha kecil golongan ekonomi lemah. Para pengusaha akan dibantu dengan penataran dan konsultasi dan dengan penyediaan kredit dengan syarat ringan. Pemasaran produknya pun dikembangkan organisasi pemasaran (*trading house*). Pemasaran produk dilakukan melalui koperasi, sehingga pemerintah membentuk Koperasi Unit Desa (KUD) yang dibantu oleh manajer yang berwirausaha dan pembantu manajer yang terampil.

Pemerintah di Repelita III melakukan pula pemerataan kesempatan berpartisipasi bagi generasi muda dan perempuan. Generasi muda dan perempuan akan diberikan penyuluhan-penyuluhan yang mampu memberdayakan diri sendiri sehingga dapat memainkan peranannya secara langsung di berbagai bidang. Peranan masyarakat terutama generasi muda dan wanita dapat membantu pemerintah dalam usaha untuk melakukan pemerataan penyebaran pembangunan ke seluruh tanah air. Pembangunan di desa dan kota akan berjalan seimbang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Pembangunan dalam Repelita III diutamakan untuk daerah-daerah terbelakang, minus dan padat penduduk.

Pemerataan penyebaran pembangunan di Indonesia masih dipusatkan pada bidang pertanian dengan melakukan kegiatan intensifikasi dan diversifikasi pertanian tanaman pangan dan juga pembangunan industri yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah. Industri akan dibangun di daerah tertentu. Target Repelita III adalah menyelesaikan

pembangunan kawasan industri di Ujung Pandang dan Medan. Selain itu akan dikembangkan pula Pusat Pengembangan Industri Kecil (PPIK) sebagai sarana pembinaan industri kecil dan program listrik pedesaan (Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 7 1979).

Dalam hal pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, pemerintah melakukan pembangunan dan pembinaan bidang hukum sehingga dapat tercipta ketertiban dan kepastian hukum untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan. Untuk itu pemerintah membentuk Pengadilan Negeri di setiap Kotamadya/Kabupaten dan Pengadilan Tinggi di setiap Provinsi sehingga kesadaran hukum alam masyarakat akan ditingkatkan serta dilakukan sikap penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil-hasil pembangunan dalam Repelita III serta belajar dari pengalaman berharga selama Repelita I, II dan III yang sudah dilaksanakan dan sebagaimana telah ditetapkan dalam GBHN, maka tujuan pembangunan Repelita IV adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang semakin merata dan adil, serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya (Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 21 1984, 17). Sasaran pembangunan Repelita IV sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-repelita selanjutnya.

Masalah yang belum dapat dipecahkan dalam Repelita III seperti masalah peningkatan laju pembangunan di daerah-daerah tertentu, peningkatan produksi pangan dan kebutuhan pokok lainnya, peningkatan kemampuan golongan ekonomi lemah, Koperasi, Kependudukan, pemilikan dan penggunaan tanah, transmigrasi, perumahan, perluasan fasilitas dan peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan dan gizi, pembinaan hukum, ketertiban masyarakat, kelestarian lingkungan hidup serta masalah-masalah lain di berbagai bidang pembangunan akan berusaha diselesaikan di Repelita IV ini.

Trilogi pembangunan masih akan dilanjutkan seperti pada Repelita-repelita sebelumnya dengan memperluas delapan jalur pemerataan yang

sudah dijalankan pada Repelita III, sehingga secara keseluruhan keadilan sosial akan mendapat perhatian yang lebih besar dalam Repelita IV. Selain itu, pelaksanaan pembangunan nasional harus berjalan bersama-sama dengan pembinaan dan pemeliharaan stabilitas nasional terutama di bidang politik, sosial dan ekonomi. Stabilitas nasional merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sehingga tercipta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis (Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 21 1984, 20).

Stabilitas di bidang politik akan dimantapkan melalui usaha-usaha dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara seluruh organisasi sosial politik serta organisasi kemasyarakatan hanya menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas berorganisasi. Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang mulai dilaksanakan sejak Repelita III akan ditingkatkan dan diperluas pemasyarakatannya sehingga akan meningkat pula kesadaran politik masyarakat, setiap warga negara, partai politik dan Golkar, organisasi kemasyarakatan serta seluruh pemerintahan. Peningkatan kesadaran politik oleh seluruh masyarakat merupakan salah satu kunci pokok bagi pemantapan stabilitas politik.

Kemantapan di bidang stabilitas ekonomi merupakan prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Repelita IV akan melanjutkan dan meningkatkan kebijaksanaan ekonomi yang selama ini telah berhasil baik seperti anggaran belanja yang berimbang dan dinamis, tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup tersebar dan merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, keseimbangan moneter serta hal lainnya yang akan disempurnakan dan dipadukan dengan usaha-usaha yang mendorong pemerataan dan laju pembangunan pada umumnya. Pengendalian tingkat laju inflasi akan dilakukan dengan perkiraan laju inflasi rata-rata sekitar 8% setahun⁸.

Sesuai dengan GBHN, maka Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama akan dirampungkan dengan selesainya pelaksanaan Repelita V. Repelita V merupakan pencapaian sasaran untuk menciptakan tahapan tinggal landas mulai Repelita VI. Tinggal landas dapat diartikan sebagai suatu proses panjang yang berkesinambungan yang akhirnya akan membawa bangsa Indonesia pada tujuan pembangunannya. Dalam masa tinggal landas

⁸ Lebih lanjut silahkan baca buku I s.d. buku IV tentang Repelita IV. Dapat diunduh di (Bappenas 2009, <http://www.bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-lima-tahun-repelita/>)

bangsa Indonesia secara berangsur-angsur dan kecepatan yang semakin meningkat, makin mengembangkan dan memantapkan ciri-ciri suatu negara dan masyarakat yang maju, adil, makmur, lestari dan tetap berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 13 1989, 19-20).

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam Repelita V adalah bagaimana melakukan pemantapan, konsolidasi dan peningkatan pembangunan di setiap bidang kehidupan bangsa agar bangsa Indonesia siap untuk memasuki awal dari tahap tinggal landas dalam Repelita VI. Masalah yang paling mendesak pada Repelita V khusus di bidang ekonomi yaitu penyediaan lapangan kerja produktif dalam jumlah yang cukup dan merata bagi angkatan kerja yang terus meningkat. Untuk mencapai sasaran ini, maka selama Repelita V diusahakan laju pertumbuhan ekonomi yang memadai dan sekaligus disertai dengan pemerataan yang makin meluas, stabilitas yang makin mantap, pola penyerapan tenaga kerja yang makin serasi antar sektor, antara kegiatan dan antar daerah, serta perubahan struktur ekonomi yang makin seimbang.

Seperti digariskan oleh GBHN, dalam Repelita V pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan akan tetap bertumpukan pada Trilogi Pembangunan. Kerangka kebijaksanaan pembangunan seperti diuraikan di atas merupakan upaya untuk memadukan pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktur ekonomi dengan pemerataan pembangunan khususnya melalui penciptaan lapangan kerja produktif yang makin luas dan merata, dengan pengembangan sumber daya manusia sebagai satu wahana sentralnya. Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan tersebut akan didukung oleh program-program yang secara langsung menunjang tercapainya pemerataan pembangunan di berbagai bidang seperti penyediaan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan berusaha. Dalam hubungan ini program-program pemerataan yang telah dilaksanakan dalam Repelita IV akan dilanjutkan dan disempurnakan pelaksanaannya. Sementara itu dalam kaitan dengan aspek stabilitas, kebijaksanaan fiskal, moneter dan neraca pembayaran yang dalam Repelita IV telah berhasil memelihara dan mengamankan stabilitas ekonomi yang mantap dan dinamis, akan dilanjutkan pelaksanaannya dalam Repelita V⁹.

⁹ Lebih lanjut silahkan baca buku I s.d. buku IV tentang Repelita V. Dapat diunduh di (Bappenas 2009, <http://www.bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-lima-tahun-repelita/>)

Repelita VI merupakan awal Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun kedua yang merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan dan pembaharuan dari PJP 25 Tahun pertama dan bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Titik berat PJP kedua diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong untuk saling memperkuat, terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lain yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional (Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 17 1994, 33-36).

Tujuan pembangunan Lima Tahun Keenam adalah (Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 17 1994, 47):

1. Menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang lebih selaras, adil, dan merata.
2. Meletakkan landasan pembangunan yang mantap untuk tahap pembangunan berikutnya.

Sasaran Umum Pembangunan Lima Tahun Keenam adalah tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia melalui peningkatan peran serta, efisiensi, dan produktivitas rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan lahir batin. Dengan ditetapkannya bidang ekonomi sebagai titik berat yang merupakan penggerak utama Pembangunan Jangka Panjang Kedua, seiring dengan kualitas sumber daya manusia, maka prioritas Pembangunan Lima Tahun Keenam adalah pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dikembangkan sebagai berikut (Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 17 1994, 48):

1. Penataan industri nasional yang mengarah pada penguatan dan pendalaman struktur industri yang didukung kemampuan teknologi yang makin meningkat; peningkatan ketangguhan pertanian; pemantapan

sistem dan kelembagaan koperasi; penyempurnaan pola perdagangan, jasa dan sistem distribusi; pemanfaatan secara optimal dan tepat guna faktor produksi dan sumber daya ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat industri yang menjamin peningkatan keadilan, kemakmuran, dan pemerataan pendapatan serta kesejahteraan rakyat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Pembangunan sumber daya manusia agar makin meningkat kualitasnya sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dengan pendidikan nasional yang makin merata dan bermutu, disertai peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian yang dibutuhkan berbagai bidang pembangunan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin mantap.

Berdasarkan sasaran umum di atas maka sasaran bidang pembangunan dalam Repelita VI tetap diprioritaskan pada bidang ekonomi; kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan; agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa; ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum, politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa; serta pertahanan keamanan dengan kebijaksanaan pembangunan tetap pada Trilogi Pembangunan. Pembangunan nasional disesuaikan dengan perubahan dan gejolak dunia sehingga jika ditemukan kendala makaantisipasi dan penanganannya dapat dilakukan sedini mungkin.

Pembangunan nasional difokuskan pada kegiatan produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, peningkatan industri, pertanian yang makin maju dan efisien, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, perdagangan dalam negeri, sistem transportasi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, pos dan telekomunikasi yang mendukung kegiatan pembangunan, pariwisata untuk meningkatkan devisa, optimalisasi kekayaan alam yang potensial, energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kehutanan, pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional, program transmigrasi, kelautan, kedirgantaraan, koperasi, sektor keuangan terutama investasi modal asing dan dalam negeri, kesejahteraan rakyat, pendidikan nasional, kebudayaan nasional, kesehatan, keluarga sejahtera, kependudukan, pembinaan generasi muda dan wanita, perumahan dan pemukiman, olahraga, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, ilmu pengetahuan

dan teknologi, hukum, otonomi daerah, politik, aparatur negara, serta pembangunan pertahanan dan keamanan¹⁰.

G. Orde Pembangunan

Keberhasilan pembangunan masa Orde Baru tertuang dalam Repelita VI pada Bab 2 tentang Hasil Pembangunan Jangka Panjang Pertama. Sasaran utama PJP I adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam pelaksanaannya, titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat (Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 17 1994, 80). Sasaran pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi selama 25 tahun pertama masa Orde Baru telah dengan pesat mengubah struktur ekonomi Indonesia dari ekonomi terpimpin menjadai ekonomi yang terbuka dan penerapan prinsip anggaran berimbang dan dinamis, sistem devisa bebas, mendorong penanaman modal, serta kebijakan ekonomi makro yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Struktur ekonomi juga telah berkembang dari ekonomi agraris tradisional menjadi ekonomi yang lebih maju yang didukung oleh industri yang makin kuat dan pertanian yang semakin tanggung sehingga kebutuhan pokok rakyat telah terpenuhi secara merata. Pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun sebesar 6,8%, jumlah penduduk miskin dari asalnya 60% dari jumlah penduduk di tahun 1970 menjadi sekitar 15% di tahun 1990, laju inflasi di tahun 1992 mencapai 5% pertahun setelah pada tahun 1966 mencapai 650%, perolehan devisa semakin tinggi dan penerimaan dalam negeri terus meningkat.
Peningkatan terjadi pula pada kemampuan lembaga keuangan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, meningkatnya neraca pembayaran serta tercapainya swasembada beras pada tahun 1984. Daya serap tenaga kerja semakin tinggi dengan penciptaan lapangan kerja dalam jumlah yang besar dan mutu yang meningkat diiringi dengan pergeseran struktur tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lainnya.

¹⁰ Lebih lanjut silahkan baca buku I s.d. buku VI tentang Repelita VI. Dapat diunduh di (Bappenas 2009, <http://www.bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-lima-tahun-repelita/>)

Program transmigrasi telah berhasil mendorong persebaran penduduk yang lebih seimbang dan pendapatan asli daerah telah berkembang pesat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan rata-rata ekonomi di tiap daerah.

2. Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Sosial Budaya meliputi pembangunan dan rehabilitasi tempat peribadatan dan pengadaan kitab suci serta meningkatkan mutu pendidikan agama. Dalam bidang pendidikan partisipasi murni sekolah dasar meningkat dari 41,4% pada tahun 1968/69 menjadi 93,5% pada tahun 1993/94. Keberhasilan tersebut dimungkinkan semenjak pencaangan wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984¹¹. Dalam bidang iptek keberhasilan didukung oleh keberadaan peneliti yang berkualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sementara pembangunan kesehatan serta program keluarga berencana mampu menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia dan menekan angka kematian bayi baru lahir. Pemerintah menyediakan pula pembangunan perumahan dan pemukiman dengan 3 program utama, yaitu program perumahan rakyat, penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama kelompok masyarakat tidak mampu.
3. Bidang politik, aparatur pemerintah, hukum, penerangan dan media massa dan hubungan luar negeri telah berhasil diterapkan pada PJP I. Politik yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila sebagai landasan yang kuat bagi kemajuan dan kemandirian bangsa. Sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita Orde Baru, pada tahun 1978 MPR dengan Ketetapan Nomor II/MPR/1978 telah menetapkan *Eka Prasetya Pancakarsa* sebagai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Dengan demikian, telah ada penuntun dan pegangan bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Pemilu telah dilaksanakan lima kali secara tepat waktu, dwifungsi ABRI telah menjadi keyakinan dan milik bersama sehingga stabilitas politik dapat berjalan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Kemampuan aparatur pemerintah dikembangkan melalui pendayagunaan manajemen pembangunan dengan proses perencanaan dari bawah ke

¹¹ Untuk keberhasilan pendidikan di jenjang SMP, SMA dan Perguruan tinggi serta keberhasilan bidang olahraga dapat dibaca dalam (Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 17 1994, 101-103)

atas dan dari atas kebawah sehingga memungkinkan untuk menampung aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan spesifikasi daerah dengan diterapkan pula pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Dalam bidang penegakan hukum pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundangan, membentuk petugas penegakan hukum serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan bantuan hukum.

Di bidang penerangan dan media massa telah diperluas penyebaran informasi tentang kebijakan dan hasil pembangunan kepada masyarakat melalui media informasi, seperti radio, televisi, film, pers, pameran serta surat kabar. Di bidang hubungan luar negeri penerapan prinsip politik luar negeri bebas aktif secara konsekuen memungkinkan Indonesia berperan aktif dalam menggalang kerja sama luar negeri secara bilateral dan melalui berbagai organisasi internasional.

4. Bidang pertahanan dan keamanan masih menitikberatkan pada pembangunan komponen kekuatan inti yaitu ABRI dengan memelihara stabilitas keamanan nasional. Pembangunan pertahanan keamanan negara selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah berhasil meningkatkan kesadaran bela negara dan mengembangkan kemampuan bangsa untuk mengatasi segala tantangan yang dihadapi bangsa dan negara, yang tercermin dalam terpeliharanya stabilitas nasional yang dinamis sehingga pembangunan nasional dapat berlangsung dengan lancar dan aman. Kebutuhan personel, alat utama, serta sarana dan prasarana pendukungnya, baik jumlah maupun kualitas, masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan pengamanan pembangunan mengingat luas, posisi wilayah negara, dan jumlah penduduk yang besar, serta kemungkinan tantangan global yang makin meningkat.

Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dapat memisahkan masalah pemerataan pendapatan dan peningkatan pendapatan rata-rata yang harus dilaksanakan bersama-sama. Menurut Agus Suparno¹² (2012) dalam (Kasenda 2013, 47), pemerintah lebih menekankan kepada pentingnya pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan pendapatan selama 25 tahun pertama pemerintahan Orde Baru. Rizal Mallarangeng¹³ (2008) dan Kuskridho

¹² Baca "Reformasi & Jatuhnya Soeharto, 2012. Jakarta: Kompas

¹³ Baca "Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992. 2008. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia dan Freedom Institute

Ambardi¹⁴ (2009) dalam (Kasenda 2013, 47) menyebutkan keberhasilan perekonomian Indonesia dalam menarik minat investor asing dikarenakan terbitnya dua undang-undang sesuai dengan resep liberal dalam mengelola perekonomian yaitu UU tentang penanaman modal asing dan modal dalam negeri dengan pokok-pokok penting sebagai berikut:

1. Jaminan tidak akan ada nasionalisasi aset perusahaan asing, namun bila terjadi ada kompensasi yang memadai
2. Jangka waktu operasi perusahaan asing 30 tahun dan dapat diperpanjang
3. Pembebasan bea masuk serta pajak untuk periode tertentu
4. Jaminan perusahaan asing dapat memilih sendiri manajemen dan pekerja teknis mereka dan dapat membawa pulang keuntungan atau modal mereka dengan leluasa.

Warisan kebijakan ekonomi Soekarno yang dipertahankan oleh Soeharto adalah hubungan ekonomi dengan Jepang. Setelah Jepang setuju untuk membayar pampasan perang yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk pembangunan Bali Beach Hotel (Kasenda 2013, 53). Namun tetap saja dalam menata ekonominya Orde Baru cenderung berorientasi ke Barat dengan membentuk IGGI (*Inter Governmental Group on Indonesia*) pada tahun 1967 di Amsterdam, dilanjutkan dengan pembukaan kantor perwakilan IMF dan Bank Dunia (Syabirin 2014, 48-49). Hanya dalam tempo 2 tahun setelah perombakan pemerintah stabilitas moneter sudah tercapai dengan cukup baik. Perlu diakui, Soeharto membawa kembali investasi dari luar negeri yang praktis menghilang di bawah pemerintahan sebelumnya. Soeharto berkonsentrasi pada pembangunan dalam negeri dan pembangunan ekonomi dengan didukung masyarakat internasional dengan mendukung program reformasi Soeharto dalam menjadwalkan utang-utang Indonesia (Wanandi 2014, 124). Keberhasilan kebijakan ekonomi Soeharto menimbulkan pertanyaan tentang apa yang telah terjadi, dan sejak kapan proses pembusukan dimulai sehingga Orde Baru berakhir tragis dan krisis ganda melanda Republik Indonesia.

H. Keberhasilan Orde Baru

Indonesia mengalami kemajuan diberbagai bidang karena mampu mengimplementasikan program-program di setiap repelita (Sanusi 2014, 79-139).

¹⁴ Baca "Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi. 2009. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

1. Bidang pertanian dan produksi pangan, Indonesia berhasil mengubah status negaranya yang semula kekurangan pangan dan merupakan negara pengimpor beras menjadi salah satu negara pengekspor beras terbesar di dunia dan mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Swasembada beras merupakan prestasi tersendiri pemerintah Indonesia karena sempat menjadi *price leading* dalam perdagangan beras internasional yang berarti harga beras di pasaran dunia ditentukan oleh permintaan Indonesia. Keberhasilan ini menghasilkan penghargaan bagi Presiden Soeharto dari FAO (*Food and Agriculture Organization*) di Roma Italia pada 14 November 1985.
2. Pembinaan olahraga khususnya bulu tangkis berhasil dilakukan oleh Indonesia dengan berkumandangnya lagu Indonesia Raya di Olimpiade Barcelona untuk cabang bulu tangkis. Keberhasilan tersebut berlanjut pada olimpiade tahun 1996, dan 2000. Prestasi lain, walau tidak menorehkan emas diraih pula pada cabang olahraga atletik dengan berhasilnya pelari Indonesia masuk perempat final di Olimpiade 1984 di Los Angeles. Prestasi lainnya diraih oleh cabang olahraga panahan dengan mendapatkan medali perak di Olimpiade Seoul 1988.
3. Indonesia berhasil mengembangkan teknologinya dengan membuat pesawat terbang modern dengan teknologinya sendiri. Pendirian industri pesawat terbang sebenarnya sudah dimulai sejak masa orde lama dengan keluarnya surat yang berisi pembentukan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan yang diresmikan pada 16 Desember 1961 dan bertugas menyiapkan pembangunan industri penerbangan yang mampu memberikan dukungan bagi penerbangan di Indonesia. Setelah melalui perjalanan panjang, pada tanggal 28 April 1976 Indonesia memiliki PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio dengan Dr. B.J. Habibie sebagai direktur utama dan diresmikan pada tanggal 23 Agustus 1976. Tahun 1985 Industri Pesawat Terbang Nurtanio berubah nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). IPTN berhasil membuat pesawat N-250 dan berhasil menerbangkannya pada tanggal 10 Agustus 1995 selama 55 menit dari lapangan udara Husein Sastranegara Bandung. Pesawat ini dinamakan Gatotkaca disebut sebagai andalan produk IPTN dan masyarakat Indonesia.
4. Satelit Palapa adalah keberhasilan Indonesia yang lain di bidang teknologi. Merupakan satelit pertama yang diluncurkan pada tanggal 9 Juli 1976

sehingga daerah-daerah bagian Indonesia mendapatkan kemudahan berkomunikasi dan menyebarkan informasi yang dimungkinkan. Sampai berakhirnya orde baru selain Satelit Palapa A1, diluncurkan pula satelit lainnya seperti Palapa A2, B1, B2, dan Indosat.

5. Di bidang kesehatan, Indonesia berhasil melaksanakan program-program untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Lembaga kesehatan berkembang pesat dengan diperbanyak jumlah Puskesmas sampai pelosok negeri, dan pengiriman dokter inpres agar dapat menjangkau wilayah terpencil. Selain itu Indonesia melalui Bio Farma berhasil mengembangkan vaksin cacar sehingga dinyatakan bebas cacar dan polio oleh WHO pada tahun 1974. Program keluarga berencana merupakan salah satu program yang sukses dilakukan sehingga angka kelahiran dapat dibatasi. Jumlah peserta KB meningkat dari 1,7 juta orang di repelita 1 menjadi 21,5 orang di repelita 5 sehingga berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Program KB menghasilkan penghargaan di bidang kependudukan dari PBB di tahun 1989.
6. Program wajib belajar merupakan salah satu program yang sukses di bidang pendidikan. Program ini diawali dengan pembangunan SD inpres diseluruh Indonesia, sehingga semua wilayah mempunyai SD Inpres. Program ini dicanangkan pada 2 Mei 1984 dengan program wajib belajar enam tahun atau setingkat SD. Ada juga program Kelompok Belajar yang merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf berusia 10-45 tahun. Program ini berhasil menurunkan jumlah penduduk yang buta huruf dari tahun ke tahun. Program beasiswa pun digulirkan di pemerintahan Orde Baru untuk memfasilitasi siswa yang berasal dari golongan tidak mampu tetapi mempunyai otak yang cerdas dan ingin bersekolah. Program beasiswa yang digulirkan cukup banyak, namun yang terkenal adalah beasiswa Supersemar.
7. Taman Mini Indonesia Indah merupakan objek wisata yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Walaupun pada awalnya banyak yang menghalang-halangi pembangunan TMII namun TMII terus tumbuh sebagai sebuah proyek yang memberikan gambaran lengkap Indonesia. Keyakinan tentang pendirian TMII terungkap dari ucapan Soeharto sebagai berikut:

“Saya tahu ada kelompok tertentu yang ingin menjadikan proyek yang kami cita-citakan itu sebagai issue politik. Mereka mencari kesempatan untuk bisa mengganggu kestabilan nasional. Saya pernah mengingatkan bahwa saya tidak akan membiarkan cara-cara yang tidak demokratis seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dan akan menindak orang-orang yang bersangkutan itu jika mereka terus melakukan tindakan mereka yang dapat mengganggu stabilitas nasional. ‘Kalau mereka tidak mengerti akan kalimat – tidak akan saya biarkan, terus terang saja, akan saya tindak’, kata saya, Demi kepentingan Negara dan Bangsa, “Super Sernar” bisa saya pergunakan untuk mengatakan ‘keadaan darurat’ Saya bertanggungjawab kepada rakyat dan Tuhan dalam mempergunakannya”(Soeharto, Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya 1989, 315).

Pendirian TMII merupakan gagasan dari Ibu Tien Soeharto yang sering melihat langsung uraian Presiden Soeharto mengenai kebesaran, keanekaragaman dan kekayaan budaya Indonesia yang seharusnya dipelihara dan dilestarikan sebagai aset nasional. Berdasarkan hal ini maka dalam pikiran Ibu Tien Soeharto untuk membuat proyek yang dapat menggambarkan “Indonesia yang besar itu ke dalam bentuk yang kecil”. Taman Mini Indonesia Indah dilengkapi dengan kolam besar dengan pulau-pulau yang menggambarkan lautan serta wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. TMII mewakili berbagai potensi dan kondisi alamiah, tokoh sejarah, flora dan fauna, suku bangsa, adat istiadat, agama dan kebudayaan daerahnya. Tujuan pendirian TMII berdasarkan amanat Presiden Soeharto untuk menciptakan keseimbangan dan pembangunan fisik ekonomi dan mental spiritual yang disebut dengan 5 aspek dan prospek yaitu: spiritual, pendidikan dan kebudayaan serta teknologi ekonomi dan kesejahteraan.

(<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/486/jbptunikompp-gdl-friskaanja-24257-1-unikom-f-1.pdf>).

I. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)

Menjelang tahun 1988 spekulasi mengenai pergantian presiden mulai mengkhawatirkan Soeharto, ditambah dengan mulai berkurangnya dukungan militer, sehingga mulai mencari sekutu lain. Presiden Soeharto mulai

menggunakan latar belakang Muhammadiyahnya dalam setiap pidatonya dan menyebutkan dirinya pernah menjadi guru dan dibesarkan sebagai anak angkat keluarga santri (Greg Barton, 2010) dalam (Kasenda 2013, 179). Perjalanan ibadah haji pada tahun 1990 mendapat berbagai tanggapan. Pakar politik menyebutkan ini adalah pertanda ketaatan dan suatu langkah biasa dalam kehidupan seseorang di kalangan umat Islam. Namun ini juga berarti, haji-nya Presiden Soeharto memiliki implikasi politis dan sebagai langkah ke arah rekonsiliasi dengan umat Islam. Kepulangan dari ibadah haji itulah yang membuat Soeharto menambah namanya dengan sebutan Haji Muhammad Soeharto.

Tahun 1990 Presiden, mensponsori pembentukan ICMI dan mendukung Habibie sebagai ketua ICMI. Kejadian ini merupakan awal di *persona non grata*-kan CSIS yang sejak awal menjadi lembaga penasehat presiden. ICMI disambut hangat oleh kalangan muslim menengah di perkotaan termasuk sejumlah LSM dan intelektual yang awalnya beroposisi terhadap pemerintah. ICMI berhasil mengembangkan struktur organisasinya di tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten dengan dukungan langsung Soeharto. Jumlah anggota ICMI mencapai 42.000 dengan anggota dari birokrat, aktivitas sosial muslim dan kaum intelektual universitas yang ingin mendapatkan akses ke pusat kekuasaan negara (Kasenda 2013, 180).

Kebijakan pro Islam dengan cepat diadopsi dengan pendirian bank syariah, harian Republika, majalah mingguan Umat yang disupervisi oleh tokoh ICMI. ICMI adalah bagian paling penting dari strategi Soeharto untuk mengakomodasi dan mengkooptasi potensi kelas menengah muslim dan pada saat yang bersamaan memperkuat basis sosial dan politik bagi dirinya sendiri. ICMI menjadi kendaraan politik baru bagi Soeharto.

J. Kejatuhan Orde Baru

Soeharto berada pada puncak kekuasaannya di pertengahan era 1980an. Tidak ada keputusan yang cukup luas dapat diambil tanpa pesetujuannya. Legitimasinya sebagai penyelenggara pembangunan perekonomian pun semakin kuat saat menyurutnya ancaman keambrokan perekonomian akibat anjloknya harga minyak. Soeharto mengembangkan konsep bangsa baru bagi Indonesia yang dibangun di atas landasan pertumbuhan dan stabilitas yang dinyatakannya sendiri dalam kepuasan dan berbagai keberhasilan yang diraih. Soeharto menjadi pemimpin terkenal di dunia, banyak pemimpin

lainnya yang ingin belajar bagaimana cara menjalankan pemerintahannya. Namun tepat pada saat Soeharto mencapai puncak kekuasaannya, dinamika yang beraksi di dalam dunia politik dan masyarakat Indonesia ternyata mulai menggerogoti landasan kekuasaannya (Kasenda 2013, 176-177).

Berawal dari krisis ekonomi di Asia yang meluas mulai dari negara di Asia Timur kemudian meluas sampai Indonesia dan menjalar juga menjadi krisis politik. Di Korea Selatan, Thailand dan Indonesia, krisis ekonomi berujung kepada pergantian kekuasaan politik. Di Indonesia, Pemerintah sudah melikuidasi 16 Bank Swasta, kurs rupiah atas dollar terus merosot, walau paket IMF sebanyak 23 Milyar dollar AS sudah dijanjikan (Denny J.A. 2006, 17). Ledakan ekonomi Orde Baru pada tahun 1990 dibangun dengan utang luar negeri yang sangat besar sehingga nilai rupiah turun nilainya ditambah dengan faktor kekeringan yang melanda Indonesia. Kemarau panjang menimpa Indonesia pada tahun 1997.

Krisis keuangan di Indonesia berdampak pada kehidupan sehari-hari rakyat. Jatuhnya nilai tukar rupiah membuat harga barang impor meningkat tajam. Perusahaan memotong gaji para pegawai agar dapat bertahan. Soeharto enggan mengimplementasikan paket reformasi ekonomi IMF karena dianggap merugikan kepentingan bisnis keluarganya dan pengusaha kroni disekelilingnya (Syamsul Hadi¹⁵, 2006 dalam (Kasenda 2013, 209). Hal ini berdampak pada munculnya gerakan mahasiswa dalam bentuk demonstrasi.

Bulan April 1998, gerakan mahasiswa berulang-ulang menjadi berita mass media di tanah air, Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas, dengan jaket almamaternya masing-masing, bergabung menjadi satu, Berbagai aksi keprihatinan berulang-ulang digelar, mulai dari Lampung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, sampai ke Ujungpandang, Berbagai universitas negeri terkemuka terlibat, seperti UI, ITB, UGM ditambah beberapa universitas swasta lainnya, Slogan yang dikumandangkan pun beragam, namun seputar reformasi ekonomi dan politik (Denny J.A. 2006, 21).

Walaupun demonstrasi mahasiswa terus berlangsung selama sidang MPR tanggal 1-11 Maret 1998 dan menuntut Presiden Soeharto mundur, namun tidak menyurutkan Soeharto yang kembali terpilih secara aklamasi sebagai presiden dalam sidang MPR tersebut. Sehingga Soeharto memasuki tahun ke-32 kekuasaannya sebagai pemimpin Indonesia. Hasil tersebut membuat situasi

15 Baca "Strategi Pembangunan Mahathir & Soeharto: Politik Industrialisasi dan Modal Jepang di Malaysia dan Indonesia. 2005. Jakarta: Pelangi Cendekia.

politik semakin memburuk. Demonstrasi mahasiswa semakin meluas dengan target politiknya kian jelas yaitu menuntut Soeharto Mundur (Kasenda 2013, 212-214). Insiden penting yang paling berpengaruh terhadap membesarnya gelombang anti Orde Baru adalah peristiwa tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 akibat tembakan peluru tajam. Tewasnya empat mahasiswa tersebut diikuti kerusuhan massa di pusat-pusat kegiatan ekonomi. Massa yang terkesan terorganisir bergerak menuju pusat-pusat keramaian membuat provokasi terhadap massa setempat untuk melakukan kekerasan, menjarah, membakar dan pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa (Muridan S. Widjojo, 1999 dalam (Kasenda 2013, 217).

Gerry van Klinken¹⁶ (2000) mengatakan dalam (Kasenda 2013, 221), para penjarah kebanyakan penduduk miskin perkotaan anti Tionghoa yang tidak memiliki keterwakilan dalam panggung politik Orde Baru. Secara umum mereka adalah orang-orang yang mengalami alienasi dalam simbol-simbol yang tidak terjangkau seperti bank, mesin ATM, supermarket, hotel dan mobil milik orang Tionghoa. Sejak kejadian tersebut, beberapa tokoh senior militer menyadari kedudukan Soeharto tidak dapat dipertahankan dan mulai menurunkan Soeharto dari kekuasaannya. Sementara itu tokoh sipil dengan diprakarsai oleh Amien Rais mendirikan Majelis Amanat Rakyat (MAR) untuk mewadahi kerja sama berbagai organisasi dan perorangan yang memiliki komitmen reformasi untuk demokrasi. MAR menuntut Presiden Soeharto mengundurkan diri agar seluruh proses reformasi untuk demokrasi dapat berjalan lancar dan damai.

Pada saat kerusuhan terjadi, Presiden Soeharto sedang berada di Kairo Mesir dan menyatakan siap mundur dan tidak akan mempertahankan kedudukannya sebagai presiden dengan kekuatan senjata dengan catatan semua itu harus dilakukan secara konstitusional. Pada tanggal 16 Mei 1998, kembalinya dari Kairo, Presiden Soeharto menerima delegasi UI yang menyampaikan aspirasi masyarakat yang meminta Presiden Soeharto untuk mundur. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengatakan "Menjadi presiden bukan keinginan saya, melainkan wujud tanggung jawab sebagai Mandataris MPR. Karena itu, bila dikehendaki setiap saat saya siap *lengser keprabon* sejauh dilakukan secara konstitusional dan damai (James Luhulima¹⁷, 2007

16 Baca: "Kerusuhan Mei dalam Edward Aspinall, Herbert Feith dan Gerry van Klinken (ed). 2000. Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Presiden Soeharto. Yogyakarta: LKiS.

17 Baca "Hari-hari Terpanjang: Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait. 2007. Jakarta: Kompas

dalam (Kasenda 2013, 225). Namun kepada rombongan delegasi MPR/DPR, Presiden Soeharto menyatakan pemerintah akan mengadakan reformasi, *reshuffle* kabinet dan membentuk Kopkamtib untuk melindungi rakyat, warga negara, aset nasional dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945 (Firdaus Syam¹⁸, 2008 dalam (Kasenda 2013, 226).

Tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR/DPR Harmoko dan para wakilnya membacakan keterangan pers yang antara lain mengatakan “demi persatuan dan kesatuan bangsa agar presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri”. Pernyataan tersebut mendapat tentangan keras dari pendukung Soeharto termasuk ABRI yang pada saat itu dipimpin oleh Jenderal TNI Wiranto dan menyatakan bahwa pernyataan Pimpinan MPR/DPR sebagai pernyataan individu dan tidak memiliki dasar hukum Ahmad Gaus¹⁹ (2010) dalam (Kasenda 2013, 228). Pernyataan pimpinan ABRI menimbulkan kekecewaan dikalangan pendukung reformasi, bahkan Amien Rais menyampaikan pidato yang cukup keras dan ditujukan pada ABRI bahwa “ABRI hanya punya dua pilihan, berpihak kepada 200 juta rakyat Indonesia atau seorang kakek yang telah berusia 78 Tahun”.

Pukulan terakhir terhadap pemerintahan Soeharto bukan datang dari luar melainkan dari dalam rezimnya sendiri. Pimpinan DPR sekali lagi meminta presiden turun dari jabatannya disertai ultimatum mengundurkan diri mulai hari Jumat atau menghadapi *impeachment* (pemberhentian) dari DPR. Soeharto masih mempunyai rencana membentuk kabinet Reformasi, namun 14 menteri di Bappenas mengirim surat pada presiden yang isinya tidak bersedia diikutsertakan dalam Kabinet Pembangunan VII yang direformasi Akbar Tandjung²⁰ (2008) dalam (Kasenda 2013, 234) sehingga Presiden Soeharto tidak jadi menumumkan Kabinet Reformasi yang dijanjikan.

Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 09.06 WIB Presiden memasuki Residential Room didampingi oleh putri sulungnya Siti Hardiyanti Rukmana dan para menteri dan memberikan pernyataan, “Saya memutuskan untuk berhenti dari jabatan saya sebagai presiden terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis, 21 Mei 1998. Sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945, Wakil Presiden Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003”. Pada kesempatan ini

18 Baca buku “Berhentinya Soeharto Fakta dan Kesaksian Harmoko”. 2009. Jakarta. Gria Media.

19 Baca buku “Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner. 2010. Jakarta: Kompas.

20 Baca “The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soeharto juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan rakyat selama memimpin dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya.

Berita pengunduran diri Soeharto hari Kamis 21 Mei 1998, segera menjadi berita dunia, Berbagai media besar di Amerika Serikat, mulai dari New York Times, Wall Street Journal sampai Washington Post, menjadikan peristiwa ini sebagai berita utama, Sementara CNN terus menerus mengulang kisah ini di TV, Berbagai media di Amerika Serikat menggambarkan bahwa seorang politisi besar dunia era perang dingin telah turun tahta. Untuk pertama kalinya selama tiga puluh dua tahun, Indonesia harus tumbuh tanpa dipimpin oleh Soeharto lagi, Sebuah era politik baru terbuka, namun masih tidak pasti apakah pergantian pimpinan ini akan membawa perubahan yang substansial, Tidak pasti pula apakah ia juga akan menghasilkan pemerintahan yang kuat secara politik (Denny J.A. 2006, 33).

K. Masa Transisi Orde Baru ke Orde Reformasi

Pengunduran diri Soeharto sebagai presiden, menandai roda reformasi yang mulai bergulir. Kevin O'Rourke dalam (Kemdikbud 2012, 642) melihat reformasi sebagai sebuah momentum ketika ada keinginan untuk berubah. Masyarakat mengharapkan perbaikan kehidupan demokrasi dan kesejahteraan melalui gerakan reformasi. Namun Orde Baru sebagai sistem ternyata tidak tumbang dalam waktu singkat dilihat dari naiknya Habibie yang disebut sebagai “presiden secara kebetulan (*president by accident*)” (O'Rourke dalam (Kemdikbud 2012, 649). Keabsahan pengangkatan Habibie dipertanyakan karena tidak dilakukan di depan MPR. Selain itu, menurut Emmerson, B.J. Habibie tidak akan mengganti kebijakan yang telah dilakukan kecuali memperbaiki rezim Soeharto.

Kedudukan Habibie yang sebelumnya merupakan anak kesayangan Soeharto dan murid politiknya dianggap sebagai penghalang bergulirnya reformasi. Namun ternyata Habibie dengan cepat merombak sebagian besar dari warisan pendahulunya. Kabinet reformasi menggantikan Kabinet Pembangunan masih diisi oleh meteri lama, namun paling tidak Habibie sudah melakukan perubahan dengan memisahkan jabatan jaksa agung dan gubernur bank sentral dari kabinet sehingga tidak dapat didepolitisasi dan dapat mendorong penerapan hukum yang lebih netral dan kebijakan moneter yang lebih independen (Kemdikbud 2012, 650).

Habibie memang tidak dapat mengubah secara drastis sistem yang ada di Indonesia. Habibie tidak akan melakukan revolusi karena rakyat sudah cukup menderita. Reformasi, seperti yang sering dikatakan Habibie bukanlah suatu revolusi namun merupakan evolusi yang dipercepat. Berbagai perubahan revolusioner dilakukan dimana perubahan tersebut tidak akan pernah terjadi sebelumnya di bawah kekuasaan Orde Baru (Kemdikbud 2012, 652). Keputusan penting yang dilakukan oleh Habibie pada masa pemerintahannya yang singkat adalah:

1. Melaksanakan pemilu di tahun 1999 walaupun secara konstitusional pemilu dapat diselenggarakan setelah masa jabatan berakhir. Diselenggarakan oleh KPU dengan 40 kontestan yang berpartisipasi. Walau Habibie kalah karena laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, namun tradisi yang telah ditetapkan masih berlangsung.
2. Mengeluarkan undang-undang otonomi sekaligus mengakhiri sistem pemerintahan yang sentralistik.
3. Mengeluarkan undang-undang yang mengapresiasi kebebasan berpendapat, sehingga setiap orang bebas untuk menerbitkan surat kabar, majalah, stasiun radio dan televisi.
4. Mengakhiri masalah Timor Timur dengan menawarkan kepada masyarakat Timor Timur untuk memilih tetap sebagai WNI atau menjadi negara merdeka (Kemdikbud 2012, 654-656).

Walaupun reformasi belum sepenuhnya berjalan, namun semangat reformasi telah nampak apalagi setelah ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme yang justru menjadi masalah pelik yang dihadapi Habibie dalam melaksanakannya. Namun Habibie sudah memperkenalkan banyak perubahan fundamental untuk membawa kembali negara bangsa ke cita-cita idealnya yang secara jelas telah ditetapkan oleh pendiri Republik Indonesia.

L. Refleksi

Pada saat Soekarno menandatangani Supersemar dan kewenangan ada di tangan Soeharto, sesungguhnya kekuasaan Presiden Soekarno sudah tidak ada lagi karena PKI sudah dibubarkan oleh Soeharto. Apalagi setelah penyerahan kekuasaan secara resmi pada tanggal 23 Februari 1967, Presiden

dengan resmi menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengembalian TAP MPRS No.IX/MPRS/1966 kepada Jenderal Soeharto. Akhir kekuasaan Soekarno diperkuat dengan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 melalui sidang istimewa pada 12 Maret 1967 yang mengangkat Letjen Soeharto sebagai Pejabat Presiden, sehingga sebagai simbol pun Soekarno tidak diakui sebagai pemegang kekuasaan (Poesponegoro dan Notosusanto 1984, 415).

Pidato Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada tanggal 16 Agustus 1967 di depan Sidang Istimewa DPR-GR menyebutkan bahwa seluruh tatanan kehidupan rakyat, bangsa dan negara harus berdasarkan pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap segala bentuk penyelewengan dan bentuk koreksi total terhadap orde lama (Abdullah 2009, 363). Di Era Soekarno, berdasarkan kepada pemikiran bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultur sehingga memunculkan ideologi yang beraneka ragam seperti nasionalis, agama, dan komunis. Hal ini membuat Soekarno berfikir untuk menggabungkan paham tersebut menjadi satu yaitu Nasakom yang bertujuan agar bangsa ini tidak terpecah. Padahal, hal ini tidak mungkin dapat terjadi, menggabungkan tiga ideologi dalam satu negara. Dampaknya, ada keinginan dari Soekarno untuk merubah dasar negara.

Setelah Soeharto berkuasa pembangunan ekonomi mengalami kemajuan yang pesat terutama dalam bidang pertanian, pendidikan, kesehatan dan pembangunan sarana prasarana. Sejak itu, kota-kota baru bermunculan di Indonesia seperti Tangerang, Depok, Bekasi, Cimahi, Sidoarjo dan banyak kota lainnya. Selain itu, perguruan tinggi di seluruh Indonesia terus meningkat. Pendidikan tinggi menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk membentuk generasi muda bangsa yang berkompeten dalam melaksanakan pembangunan di segala sektor. Untuk itu pemerintah membentuk lembaga pemberi beasiswa agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tinggi (Kemdikbud 2012, 325).

Sejarah Orde baru adalah sejarah sebuah bangsa sebagai sebuah bagian dari masa lalu yang berpengaruh terhadap masa kini dan masa depan kita. Tuntutan untuk melukiskan masa lalu berdampingan dengan rekonstruksi sejarah yang mempersoalkan makna (Kasenda 2013, 258). Berdamai dengan sejarah menjadikan keharusan untuk menyelesaikan sejarah dan kalau perlu

dengan menulis sejarah baru. Taufik Abdullah dalam Daniel Dhakidae²¹ (2011) dalam (Kasenda 2013, 258) mengatakan, sejarah harus dihadapi dengan rasa tanpa dendam, tanpa nostalgia dan dijadikan sebagai alat untuk memahami perilaku manusia dalam proses perubahan dan sumber kearifan pembebasan dari beban dan trauma masa lalu.

Setelah tidak menjabat Presiden dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto kembali menjadi rakyat biasa. Hari-hari kehidupannya dilalui dengan bercengkerama bersama cucu-cucu dalam kesederhanaannya. Walaupun tahu kondisi rakyat Indonesia setelah Soeharto turun dari jabatan, namun sesuai janjinya untuk lengser keprabon, madeg pandhita maka Soeharto menempatkan diri sebagai seseorang yang selalu memberikan nasihat dan dukungan kepada pejabat pemerintah berikutnya agar dapat membawa bangsa menjadi lebih baik.

21 Baca lebih lanjut buku Daniel Dhakidae mengenai "Cita-cita Kesatuan, Bahasa dan Kebangsaan: Melawat ke Kongres Pertama setelah Delapan Puluh Lima Tahun". Prisma. Volume 30 No.2 Tahun 2011

Daftar Pustaka

Abdullah, Taufik. 2009. *Indonesia: Toward Democracy*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Bappenas. 2009. "Dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun." *bappenas.go.id*. 29 Januari. <http://www.bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-lima-tahun-repelita/>.

Denny J.A. 2006. *Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.

Departemen Pertanian. 1994. *Presiden Soeharto dan Pembangunan Pertanian*. Jakarta: PT Citra Media Persada.

Kasenda, Peter. 2013. *Soeharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Kemdikbud. 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kemdikbud. 2014. *Presiden Republik Indonesia 1945-2014*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum. 2010. *Pemilu untuk Pemula*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum. http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf.

Kompas, Harian Pagi. 1966. "Presiden Memerintahkan Letdjen Soeharto bertindak menjelamatkan Revolusi." *KompasData on Instragram*. 14 Maret. <https://instagram.com/p/0Fuay1IUiu/>.

Lampiran Keputusan Presiden Nomor 11. 1974. "Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (Repelita II)."

Lampiran Keputusan Presiden RI No. 319. 1968. "Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1969/70 - 1973/74."

Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 13. 1989. "Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (Repelita V) 1989/90 - 1993/94."

Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 17. 1994. "Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) 1994/95 - 1998/99."

Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 21. 1984. "Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (Repelita IV) 1984/85 - 1988/89."

Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 7. 1979. "Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Repelita III) 1979/80 - 1983/84."

Luhulima, James. 2006. *Menyingkap Dua Hari Tergelap di Tahun 1965-Melihat Peristiwa G30S dari Perspektif Lain*. Jakarta: Kompas.

Moertopo, Ali. 2004. "Strategi Pembangunan Nasional." Dalam *Kebijakan Politik Fusi: Suatu Tujuan Politik Kepartaian Rezim Orde Baru*, oleh Eka Nova Prasetya Pinem, 48. Medan: FISIP Universitas Sumatera Utara.

Notosusanto, Nugroho. 1985. "Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969." Dalam *Pancasila Ideologi dan Dasar Negara RI*, oleh Departemen Penerangan. Jakarta: Departemen Penerangan.

Poesponegoro, Marwati Djoenet, dan Nugroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka.

Pusaka Indonesia. 2015. "Mengenang Supersemar dan Kontroversinya." *pusakaindonesia.org*. 11 Maret. <http://www.pusakaindonesia.org/mengenang-supersemar-dan-kontroversinya/>.

Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. 2000. *Sejarah TNI Jilid IV (1966-1983)*. Jakarta: Markas Besar TNI.

Sanusi, M. 2014. *Kenangan Inspiratif Orde Lama dan Orde Baru*. Yogyakarta: Saufa.

Soeharto. 1967. "Pidato Pejabat Presiden: Orde Baru."

—. 1989. *Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*. Jakarta: Citra Kharisma Bunda.

Syabirin, Tabrani. 2014. *Menjinakkan Islam: Strategi Politik Orde Baru*. Jakarta: Teras.

Tempo. 1997. "Saat-saat Jatuhnya Presiden Soekarno: Perjalanan Terakhir Bung Besar." *Analisa dan Peristiwa*. 5 April. <http://tempo.co.id/ang/min/02/05/utama7.htm>.

Wanandi, Jusuf. 2014. *Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.